

LAPORAN KINERJA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Gerbang Kompetensi Indonesia Emas 2045

20
23



Laporan Kinerja 2023

Gerbang Kompetensi Indonesia Emas 2045

©2024 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pengarah : Syamsi Hari, S.E., M.M. & drg. Ulfah Mashfufah, M.K.M.
Penanggung Jawab : Fauziah, S.E., M.Si.
Penyelia : Nurwijoyo Satrio Aji Martono, S.H.I.
Miftakul Azis, M.H.
Adi Mahfudz Wuhadji, M.B.A
Prof. Dr. Amilin, S.E., M.Si.
Muhammad Nur Hayid, S.Th.I., M.M.
Penyusun : Laura Ariesta & Tim Data dan Informasi
Editor : Rafli Syahrizal
Desainer : Rafli Syahrizal

Cetakan I, Juli 2024
viii hlm. + 76 hlm.; 21 x 29,7 cm
Font yang pakai: Montserrat Alternates, Gotham, dan Uni Neue (OTF).

Diterbitkan oleh

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Jl. Letjen MT Haryono Kav. 52,
RT.3/RW.4, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630
Telepon: 021-7992685
E-mail: admin@bnsp.go.id
Website: bnsp.go.id



BINSP
BADAN NASIONAL SERTIKASI PROFESI



KATA PENGANTAR



Menyongsong Indonesia Emas 2045, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mendukung pemerintah dalam menghadirkan SDM-SDM berkualitas dengan kompetensi yang berdaya saing global. Dalam menjalankan perannya itu, BNSP disokong SDM berkualitas yang berkiprah dalam mengawal para pemangku kepentingan dan mewarnai perjalanan proses sertifikasi kompetensi tersebut. Mereka adalah para Anggota BNSP periode III (2018—2023) yang telah bertugas dengan penuh dedikasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dalam menciptakan SDM yang unggul.

Tercatat sejak 6 Juli 2023, BNSP telah berkiprah selama 18 tahun menjadi lembaga pemerintah yang menerbitkan sertifikasi kompetensi sehingga Indonesia semakin percaya diri melaju di kancah global dengan dukungan SDM yang unggul. Perjalanan 18 tahun bukanlah waktu yang singkat. Perjalanan belasan tahun tersebut membuat BNSP berkembang dan kian matang dalam berkiprah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, terdapat landasan hukum yang kuat dan terstruktur dalam operasionalisasi lembaga ini. PP tersebut memperkuat tugas dan fungsi BNSP, serta memperjelas struktur organisasi dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi profesi di Indonesia. Dengan adanya PP ini, BNSP diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan program-programnya dan memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.





Terlebih dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) 68 tahun 2022 pasal 16 ayat 3 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang menandai transformasi BNSP sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap sertifikasi profesi. Perpres tersebut memacu BNSP untuk terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan kinerja di masing-masing bidang.

Selain itu, terjadinya pandemi Covid-19 mendorong setiap institusi, termasuk BNSP untuk lebih tanggap teknologi, terutama teknologi digital agar data dan informasi dapat diakses dari mana pun secara *real time*. Kemudian, penyelenggaraan sertifikasi secara daring masih terus berlangsung untuk memudahkan para SDM unggul dari daerah dan pelosok memperoleh sertifikasi profesi yang dibutuhkan.

Karena itu, untuk merekam jejak langkah kinerja BNSP selama tahun 2023, BNSP menerbitkan buku *Laporan Kinerja BNSP Tahun 2023: Gerbang Kompetensi Indonesia Emas 2045*. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden RI, Kementerian Ketenagakerjaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Kehadiran laporan ini akan memberikan gambaran kinerja BNSP setiap tahunnya sebagai intisari pembelajaran dan manajemen pengetahuan sehingga ke depannya BNSP terus mendapatkan gagasan dan inspirasi untuk mengadakan evaluasi dan pembaruan.

Melalui terbitnya buku *Laporan Kinerja BNSP Tahun 2023: Gerbang Kompetensi Indonesia Emas 2045*, kami hendak menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung BNSP selama berkiprah, terutama lembaga negara/kementerian dan lembaga swasta yang telah menyelenggarakan sertifikasi profesi di semua sektor pekerjaan. Kami juga berterima kasih atas dukungan dan kerja sama dari sumber daya sertifikasi sebagai kepanjangan tangan BNSP, yaitu lembaga sertifikasi profesi (LSP), tempat uji kompetensi (TUK), master asesor, dan asesor kompetensi.



Semoga terbitnya buku ini dapat menjadi dokumentasi atas kinerja BNSP pada tahun 2023 sehingga ke depannya penerbitan buku ini tetap dapat diteruskan sebagai sebuah tradisi intelektual. Selain itu, buku ini juga akan berfungsi memberi pemahaman yang komprehensif tentang sertifikasi kompetensi. Harapan juga tersemat pada anggota periode IV tahun 2023—2028 dapat menjalankan perannya untuk semakin memajukan BNSP dan mendukung program Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Mei 2024
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Syamsi Hari, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | iv

DAFTAR ISI | vii

BAB I PENDAHULUAN | 1

- A. Latar Belakang — 2
- B. Gambaran Umum Tahun 2023 — 3
- C. Visi, Misi, Tugas, Fungsi, dan Organisasi BNSP — 7
- D. Struktur Organisasi — 8
- E. Sekretariat BNSP — 12

BAB II PROFIL BNSP | 15

- A. Sejarah Ringkas BNSP — 16
- B. Dasar Hukum Sistem Sertifikasi Kompetensi — 18
- C. Sarana dan Prasarana — 19
- D. Jenis Layanan BNSP — 22

BAB III CAPAIAN KINERJA | 25

- A. Kinerja Bidang Lisensi — 26
- B. Kinerja Bidang Sertifikasi — 40
- C. Kinerja Bidang Hukum dan Kerja Sama — 51
- D. Kinerja Bidang Data dan Informasi — 62
- E. Kinerja Bidang Umum — 68

BAB IV PENUTUP | 73





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tahun 2023 ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian dan hasil kerja BNSP sepanjang tahun 2023. Laporan ini mencakup berbagai aspek kinerja yang mencerminkan upaya BNSP dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program sertifikasi profesi yang terstruktur dan berkesinambungan.

Dalam laporan ini, akan disajikan berbagai data dan analisis yang menggambarkan kontribusi BNSP terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Dengan fokus pada peningkatan mutu dan standarisasi profesi, BNSP terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap individu yang tersertifikasi memiliki kompetensi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional.

Selama tahun 2023, BNSP menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang memacu inovasi dan peningkatan kinerja. Laporan ini tidak hanya mencakup pencapaian-pencapaian, tetapi juga strategi-strategi yang telah diimplementasikan untuk mencapai hasil yang optimal. Laporan ini juga menyajikan evaluasi terhadap efektivitas berbagai program dan inisiatif yang telah dilaksanakan, serta memberikan gambaran mengenai rencana pengembangan pada masa mendatang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai kinerja BNSP selama tahun 2023. Dengan penyajian data yang terstruktur dan analisis yang mendalam, harapannya laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat luas. Pencapaian yang telah diraih tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Karena itu, kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua mitra kerja, pemangku kepentingan, dan seluruh SDM yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNSP.

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab membina dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia agar menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten di bidangnya, BNSP menyadari pentingnya memiliki SDM internal yang juga kompeten dan berintegritas tinggi. Kompetensi internal ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi

dan peran BNSP dalam menggiring SDM Indonesia menuju keunggulan profesional dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada tahun 2023, BNSP mengalami momen penting dalam sejarah organisasinya dengan dilakukannya pergantian anggota dari periode ketiga (2018—2023) ke periode keempat (2023—2028). Pergantian ini memang perlu dilakukan karena setiap lima tahun, periode kepengurusan BNSP berakhir. Proses pergantian ini merupakan bagian dari siklus rutin yang bertujuan menyegarkan dan memperkuat struktur organisasi dengan membawa perspektif baru yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pada masa mendatang.

Proses transisi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan akan kesinambungan program-program yang telah berjalan, sekaligus memperkenalkan inovasi dan strategi baru untuk mencapai tujuan BNSP. Pergantian anggota ini juga merupakan wujud komitmen BNSP dalam menjaga kualitas kepemimpinan dan manajemen internalnya. Anggota baru diharapkan dapat membawa semangat baru dan gagasan inovatif yang dapat mendorong peningkatan kualitas layanan sertifikasi profesi di Indonesia. Dengan demikian, BNSP dapat terus menjalankan misinya dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global.

B. Gambaran Umum Tahun 2023

Saat ini BNSP digawangi oleh anggota baru. Tepatnya pada bulan November 2023 lalu, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah telah melantik anggota baru BNSP periode IV 2023—2028, untuk menggantikan anggota sebelumnya yang telah berdedikasi penuh selama tahun 2018—2023. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 52/M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pada saat yang bersamaan, Ida Fauziah berpesan agar para anggota baru tersebut terus meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan dunia industri, yaitu berupa tenaga kerja yang profesional.

Selama periode 2018—2023, para Anggota BNSP periode ketiga, yakni Kunjung Masehat, S.H., M.M. (Ketua/unsur pemerintah), Miftakul Azis, M.H. (Wakil Ketua/unsur masyarakat), Tetty D.S. Ariyanto, S.ST. Par, M.Par., Bonardo

Aldo Tobing, BSBA, Drs. Muhammad Zubair, M.Si. AIIIS, Drs. Mulyanto, M.M. (unsur masyarakat) dan Henny S. Widyaningsih, M.Si. (unsur pemerintah) telah menjalankan peran mereka dengan baik.

Sewaktu mereka dilantik pada tahun 2018 lalu oleh Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, pesan yang mereka terima adalah bahwa BNSP memiliki tugas berat untuk memastikan agar rekrutmen semua industri mulai memberikan opsi yang berbasis sertifikat kompetensi. Hal itu dilakukan, agar ke depannya para *stakeholder* pemberi pekerja dapat memperoleh dua pilihan, yakni menggunakan ijazah dan sertifikat kompetensi.



Gambar 1. Pelantikan Anggota BNSP periode 2018–2023 oleh Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri

Khususnya selama tahun 2023, ketujuh Anggota BNSP telah menjalankan peran mereka pada kelima bidang yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab spesifik. Berikut ini adalah perincian peran yang dijalankan oleh anggota BNSP berdasarkan Keputusan Ketua BNSP Nomor Kep.0050/BNSP/II/2019 tentang penunjukkan koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNSP.

1

Anggota Selaku Koordinator Lisensi

Anggota ini bertanggung jawab atas proses pemberian lisensi kepada calon LSP dan melakukan pengembangan skema sertifikasi baru yang relevan dengan kebutuhan industri. Selama tahun 2023, anggota yang terlibat di bidang ini telah bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap LSP yang mendapatkan lisensi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Proses asesmen dan evaluasi dilakukan sesuai prosedur untuk menjamin kredibilitas dan integritas LSP.

2

Anggota Selaku Koordinator Sertifikasi

Anggota ini berfokus pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di Indonesia. Mereka memastikan bahwa proses sertifikasi sesuai prosedur dan penerapan prinsip-prinsip asesmen mengacu pada standar kompetensi yang berlaku. Inovasi dan peningkatan metode asesmen (uji sertifikasi) juga menjadi bagian dari tanggung jawab bidang ini.

3

Anggota Selaku Koordinator Jaminan Mutu, Perencanaan, Hukum, dan Umum

Anggota yang bekerja di bidang ini menjalin kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga dan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan pengakuan internasional terhadap sertifikasi yang diberikan oleh BNSP.

4

Anggota Selaku Koordinator Data dan Informasi

Anggota ini berperan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem data serta informasi terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Selama tahun 2023, anggota di bidang ini telah mengimplementasikan berbagai sistem teknologi informasi untuk mempermudah akses data sertifikasi. Peningkatan kualitas *database* dan integrasi informasi juga menjadi fokus utama guna mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data.

5

Anggota Selaku Koordinator Pengembangan SDM

Anggota ini berperan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan bagi para master asesor, asesor lisensi, dan asesor kompetensi, serta dengan memberikan lisensi kepada para master asesor dan asesor.

Komitmen penuh para anggota BNSP periode ketiga telah terealisasi melalui kinerja selama 2023. Kinerja tersebut dipaparkan dalam *Laporan Kinerja 2023: Gerbang Kompetensi Indonesia Emas 2045*. Tidak dapat dimungkiri, kinerja yang sudah dilakukan BNSP merupakan bentuk dukungan terhadap visi dan misi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan SDM Indonesia yang mumpuni dan kompeten sehingga diakui di dunia internasional.

C. Visi, Misi, Tugas, Fungsi, & Organisasi



1. Visi

Menjadi lembaga otoritas sertifikasi profesi yang independen dan terpercaya dalam menjamin kompetensi tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

2. Misi

- a. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi profesi yang terpercaya.
- b. Meningkatkan rekognisi dan daya saing tenaga kerja Indonesia di dalam maupun di luar negeri.
- c. Membangun kerja sama saling pengakuan sertifikasi kompetensi secara internasional.

3. Tugas & Fungsi

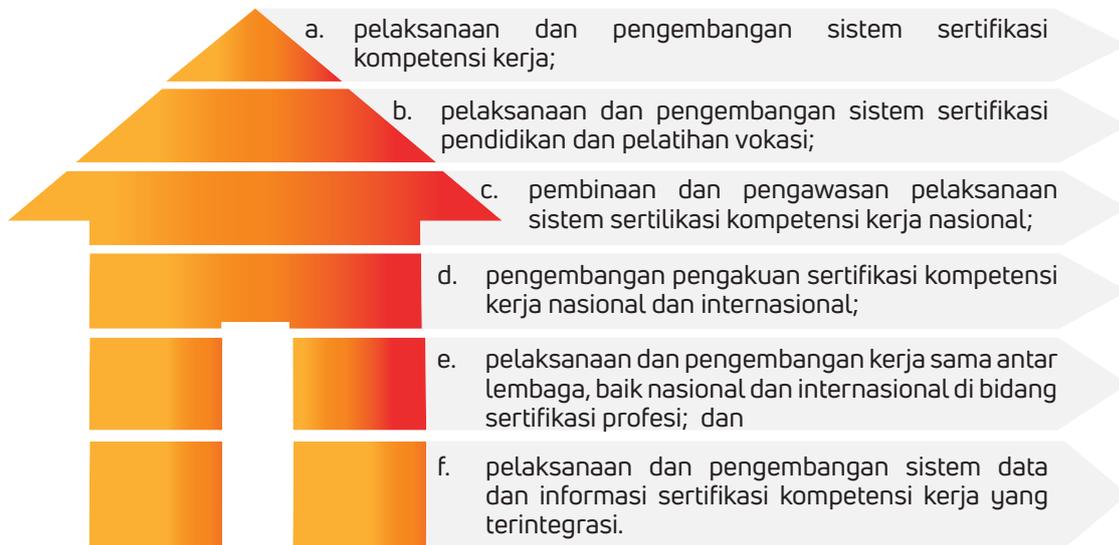
BNSP lahir dari kebutuhan pentingnya meningkatkan kualitas SDM Indonesia di berbagai sektor. Dengan adanya sertifikasi dari BNSP, SDM Indonesia akan diakui kompetensinya sampai ke luar negeri sehingga meningkatkan daya saing dalam bursa kerja internasional.

BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. BNSP berwenang sebagai otoritas sertifikasi personel yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja di Indonesia agar semakin diakui di dunia industri. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas di Indonesia.

Merujuk pada sejarah, gagasan paradigma baru ini didasari oleh dua prinsip utama, yaitu (1) penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (*demand driven*); dan (2) proses pendidikan dan pelatihan sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (*competency based training/CBT*).

Pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru ini mulai dilaksanakan pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Umum Kadin Indonesia. SKB ini menjadi titik tolak penguatan peran kelembagaan BNSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kemudian pada tanggal 15 Maret 2018, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Terbitnya PP ini menandai babak baru peran strategis BNSP dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia dan sebagai badan independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak berdirinya, BNSP mengemban tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Untuk melaksanakan tugasnya, BNSP melakukan fungsi sebagai berikut.



D. Struktur Organisasi

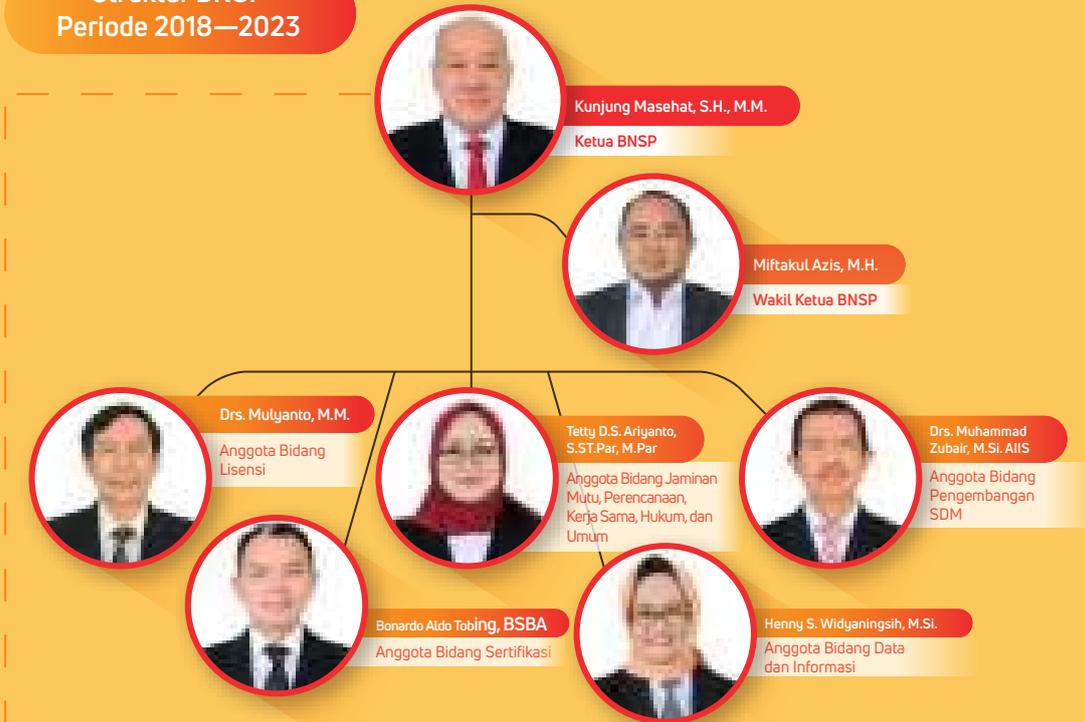
Struktur BNSP disusun berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2018. Struktur organisasi periode 2018—2023 tersebut ditempati oleh tujuh anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota yang masing-masing memimpin bidang tertentu. Organisasi ini memiliki lima bidang utama, yaitu (1) Bidang Lisensi; (2) Bidang Sertifikasi; (3) Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum; (4) Bidang Data dan Informasi; serta (5) Bidang Pengembangan SDM.

Berikut ini adalah susunan organisasi BNSP periode 2018–2023.

Tabel 1. Struktur Organisasi BNSP Periode 2018—2023

Jabatan	Nama
Ketua (Merangkap Anggota)	Kunjung Mulaikat, S.H., M.H.
Wakil Ketua (Merangkap Anggota)	Mubekti Aziz, M.H.
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> + Drs. Mulyanto, M.H. + Sonando Aldo Tobing, BSRA + Teddy D.S. Arjanto, S.ST, Par, M.Pd + Hermy S. Widyaningsih, M.Si + Drs. Muhammed Zubair, M.Si, AIS

Struktur BNSP Periode 2018—2023



Struktur Sekretariat BNSP



Kemudian pada tanggal 13 November 2023, struktur organisasi BNSP berubah karena pada hari itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah melantik tujuh anggota BNSP periode keempat untuk masa jabatan tahun 2023–2028. Berikut adalah tujuh anggota BNSP periode 2023–2028 yang dilantik.

Tabel 2. Struktur Organisasi BNSP Periode 2023—2028

Jabatan	Nama
Ketua (Merangkap Anggota)	Syamsi Hari, S.E., M.M.
Wakil Ketua (merangkap Anggota)	drg. Ulfa Mashufah, M.K.M
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Amin, S.E., M.Si. • Miftakul Azis, M.H. • Adi Mahfudz Wuhadji, M.B.A. • Nurwijoyo Satrio Aji Martono, S.HI. • Muhammed Nur Haydi, S.Th.I, M.M.

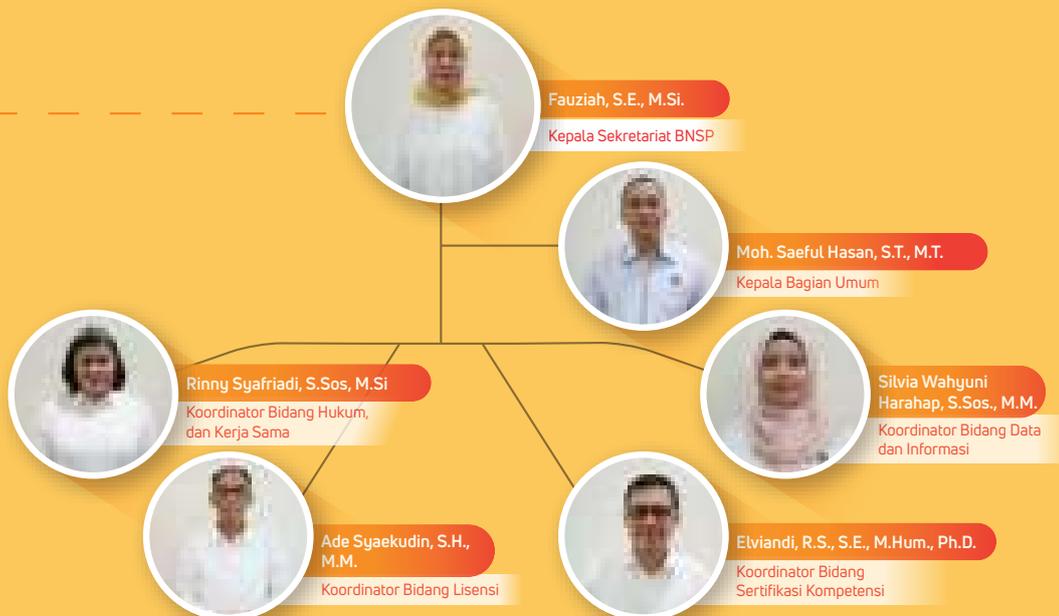


Gambar 2. Pelantikan Anggota BNSP periode 2023–2028 oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah

**Struktur BNSP
Periode 2023—2028**



Struktur Sekretariat BNSP



E. Struktur Sekretariat

Sekretariat BNSP sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNSP, pada tahun 2022 mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Perubahan nomenklatur ini tidak hanya memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam Sekretariat BNSP, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya peraturan baru ini, Sekretariat BNSP mampu melakukan pengelolaan yang lebih terstruktur dan sistematis, baik dalam perencanaan program, pengelolaan sumber daya, hingga penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan stakeholder terkait.

Adapun Sekretariat BNSP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Tugas

Sekretariat BNSP mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada BNSP.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BNSP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi, tata laksana, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi, pengelolaan manajemen mutu, dan kerja sama;
- c. pemberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian lisensi lembaga sertifikasi profesi;
- d. pemberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian sertifikasi kompetensi kerja; dan
- e. pengelolaan data, informasi dan publikasi, serta pengembangan sistem informasi sertifikasi kompetensi kerja.

Struktur organisasi Sekretariat BNSP periode 2018–2023 didesain untuk mendukung tugas dan fungsi yang telah diuraikan. Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, struktur ini mencakup berbagai bagian yang masing-masing bertanggung jawab atas fungsi-fungsi spesifik, mulai dari perencanaan dan pengelolaan anggaran hingga pengelolaan data dan informasi. Dengan struktur dan fungsi yang telah ditetapkan, Sekretariat BNSP diharapkan dapat berperan secara optimal dalam mendukung BNSP mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas dan kredibilitas sertifikasi profesi di Indonesia.



Gambar 3. Pengambilan Sumpah pada Agenda Pelantikan Anggota BNSP Periode 2018—2023 di Ruang Tri Dharma Kemnaker, Jakarta



Gambar 4. Pelantikan Anggota BNSP Periode 2023—2028 di Jakarta



BAB II

PROFIL BNSP

A. Sejarah Ringkas

Cikal bakal pembentukan BNSP berawal dari dua lembaga pemerintah pada tahun 1990-an. Pertama, Dewan Latihan Kerja Nasional (DLKN) yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja tahun 1990. Lembaga ini bertujuan memberikan rekomendasi kepada Menteri Tenaga Kerja tentang peningkatan kualitas tenaga kerja. Kedua, Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) yang dibentuk melalui nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kadin. Lembaga ini bertujuan menjalin hubungan antara pendidikan menengah vokasi (SMK) dan industri.

Kesamaan tujuan kedua lembaga tersebut mencetuskan gagasan untuk menggabungkannya menjadi Badan Nasional Pendidikan dan Pelatihan Profesi (BN3P). Pembentukan BN3P dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Ketua Kadin yang ditandatangani pada 15 Mei 2000.

BN3P berperan penting ketika DPR-RI menyusun RUU Ketenagakerjaan dan Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya bagian tentang Pelatihan Kerja, sangat dipengaruhi oleh konsep BN3P yang menekankan pentingnya kompetensi tenaga kerja, standar kompetensi, dan sertifikasi kompetensi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mencantumkan kewajiban bagi lulusan SMK untuk memiliki sertifikat kompetensi selain ijazah.

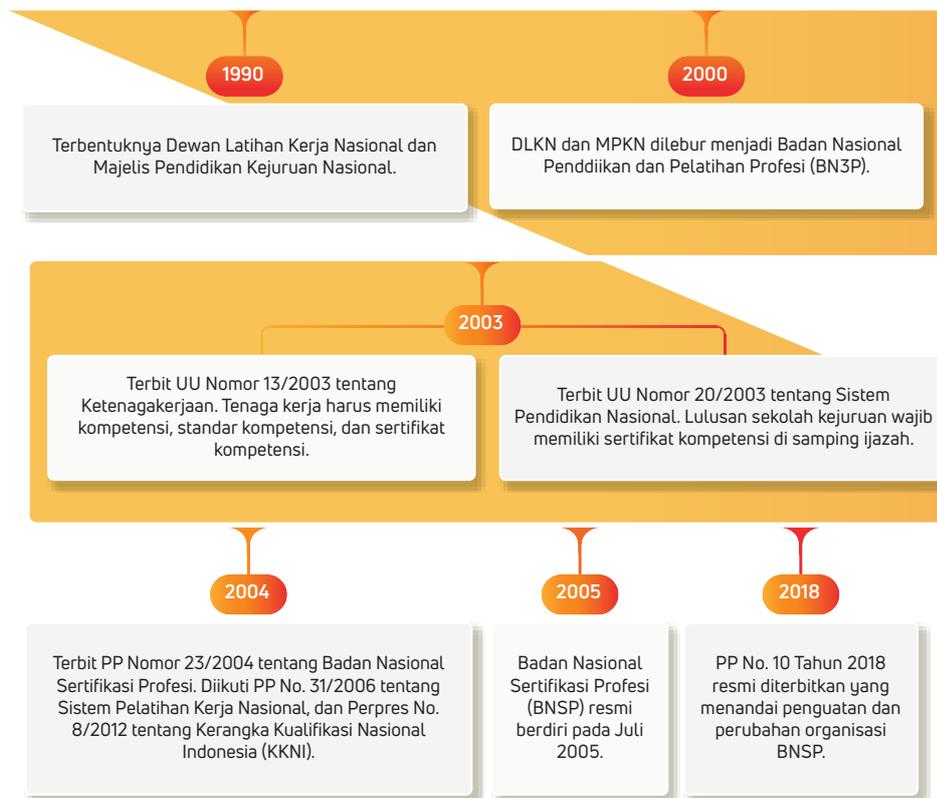
Selanjutnya muncul tiga regulasi lagi, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ketiga regulasi ini membentuk satu kesatuan Sistem Pengembangan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi dengan tiga pilar utama yaitu standar kompetensi, program diklat berbasis kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

Setahun setelah diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2004, BNSP resmi didirikan pada bulan Juli 2005 yang ditandai dengan pengukuhan keanggotaan BNSP oleh Menteri Tenaga Kerja atas nama Presiden RI. Kemudian, organisasi

BNSP diperkuat dan diubah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP. PP ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2018 dan diundangkan oleh Menkum HAM, Yasonna H. Laoly, pada 16 Maret 2018. PP ini menggantikan PP Nomor 23 Tahun 2004. Salah satu perubahan penting yang dibawa oleh PP baru ini adalah pengurangan jumlah Anggota BNSP dari 23 orang menjadi 7 orang saja.

Linimasa Perjalanan Sejarah

Badan Nasional Sertifikasi Profesi



B. Dasar Hukum

BNSP sebagai lembaga independen yang melaksanakan sertifikasi kompetensi di Indonesia, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, dalam sejarahnya dibentuk melalui Undang-Undang. Terbentuknya BNSP adalah momentum bersejarah dalam konteks pembangunan SDM di Indonesia. BNSP sebagai lembaga negara yang melaksanakan Sistem Sertifikasi Kompetensi secara nasional dilandasi oleh dasar hukum berikut ini.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 108);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; dan
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Pada Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

C. Sarana dan Prasarana

Operasional BNSP didukung oleh Gedung Sekretariat BNSP yang berlokasi di Jalan M.T. Haryono, Kav. 52, Jakarta Selatan. Bangunan yang terdiri atas empat lantai itu telah memiliki sarana dan prasarana yang representatif untuk mendukung pelayanan optimal bagi para pemangku kepentingan sertifikasi kompetensi dan publik yang memerlukan informasi seputar sertifikasi kompetensi.

Renovasi Kantor Sekretariat BNSP telah dilakukan secara bertahap dan dimulai sejak tahun 2021 hingga rampung pada tahun 2022. Saat ini, BNSP memiliki berbagai jenis ruangan yang tersebar di beberapa lantai gedung. Di lantai pertama, terdapat satu ruangan lobi yang berfungsi sebagai area penerimaan tamu dan pengunjung. Lobi ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas *autogate* untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses bagi pegawai dan tamu yang berkunjung ke gedung BNSP.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana BNSP Tahun 2023

Sarana dan Prasarana	Fasilitas
Lantai 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Resepsionis ▪ Pintu Autogate ▪ Lobi Tamu ▪ Musala ▪ Ruang Konsultasi ▪ Toilet
Lantai 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Rapat I BNSP ▪ Ruang Rapat II BNSP ▪ Ruang Kerja Anggota BNSP
Lantai 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Kerja Bidang Lisensi ▪ Ruang Kerja Bidang Sertifikasi ▪ Ruang Kerja Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum ▪ Ruang Kerja Bidang Data dan Informasi
Lantai 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Ketua BNSP ▪ Ruang Wakil Ketua BNSP



1

Gambar 5. Ruang Rapat I



2

2

Gambar 6. Ruang
Tunggu di Lobi



3

3

Gambar 7. Ruang Rapat II



4

4

Gambar 8. Ruang
Konsultasi



5

Gambar 9. Ruang Laktasi



6

Gambar 10. Rooftop



7

Gambar 11. Aula



8

Gambar 12. Toilet

Selain lobi, terdapat dua ruangan konsultasi yang juga terletak di lantai pertama. Ruangan itu difungsikan sebagai tempat untuk memberikan konsultasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, terdapat empat ruang tunggu tamu yang tersebar di beberapa lantai gedung. Dua ruangan berada di lantai pertama, satu ruangan di lantai dua, dan satu ruangan di lantai tiga. Ruang tunggu ini disediakan untuk kenyamanan tamu dan pengunjung yang sedang menunggu giliran.

Di lantai pertama juga terdapat satu ruangan laktasi yang diperuntukkan bagi ibu menyusui. Selain itu, terdapat satu ruangan perpustakaan yang menyediakan berbagai referensi dan literatur yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi. Lalu, terdapat ruang arsip yang berada di lantai pertama. Ruangan tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting.

Untuk mendukung operasional teknologi, terdapat satu ruang server yang berada di lantai dua. Ruang ini digunakan untuk menyimpan server dan perangkat jaringan lainnya. Selain itu, terdapat empat ruang rapat yang tersebar di setiap lantai gedung, masing-masing satu di setiap lantai. Ruang-ruang ini digunakan untuk berbagai pertemuan dan rapat internal maupun eksternal.

Jumlah ruangan kerja yang dimiliki BNSP mencapai sembilan ruangan, dengan masing-masing tiga ruangan di lantai pertama, kedua, dan ketiga. Ruangan kerja ini digunakan oleh staf dan pegawai BNSP untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

D. Jenis Layanan BNSP

Meski dalam perjalanannya mengawal tenaga kerja Indonesia yang kompeten tidak berjalan mulus, BNSP tetap melaju demi mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu, BNSP juga kerap disalahpahami oleh berbagai pihak tentang eksistensi, serta tujuan dan manfaat sistem sertifikasi kompetensi, baik untuk kepentingan individu tenaga kerja, kepentingan organisasi pengguna tenaga kerja, pembangunan bangsa dan negara, serta manfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, tingkat pengakuan dari pihak industri terhadap sertifikasi yang telah dimiliki tenaga kerja, masih rendah sehingga sertifikat yang dimiliki belum memiliki dampak positif sebagaimana yang diharapkan.

Namun perlu diperhatikan, sejak berdirinya, BNSP memiliki pertumbuhan yang amat cepat. Ini terlihat dari progresifnya jumlah permintaan lisensi, pelayanan informasi, jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi, serta banyaknya jumlah masyarakat yang semakin paham akan sertifikasi kompetensi. Karena itu, BNSP terpacu untuk mempertahankan standar pelayanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan dan publik. Berdasarkan fungsinya, pelayanan yang diberikan oleh BNSP tertuang dalam ruang lingkup enam kegiatan berikut ini.

1 Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi

Fungsi ini dijalankan melalui layanan lisensi dan relisensi terhadap LSP, baik LSP P-1, P-2, dan P-3. Selain itu, terkait pengajuan skema sertifikasi dan penambahan ruang lingkup (PRL), BNSP juga melakukan verifikasi.

2 Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Pendidikan

Fungsi ini dijalankan melalui percepatan pembentukan LSP P-1 di SMK dan di perguruan tinggi, guna memastikan peserta didik di SMK dan perguruan tinggi mengikuti uji sertifikasi kompetensi.

3 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional

Fungsi ini dijalankan melalui surveilans terhadap LSP dan penindakan terhadap LSP yang melanggar melalui pencabutan lisensi dan pembekuan. Pembinaan juga dilakukan melalui lokakarya dan pelatihan.

4 Pelaksanaan dan Pengembangan Kerja Sama Antarlembaga, Baik Nasional dan Internasional di Bidang Sertifikasi Profesi

Fungsi ini dijalankan melalui pembuatan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. BNSP juga aktif dalam kegiatan pengembangan sistem sertifikasi, terutama dengan negara-negara ASEAN.

5 Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Sertifikasi Kompetensi Kerja yang Terintegrasi

Fungsi ini dijalankan melalui pengembangan sistem data dan informasi digital berbasis situs web yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sertifikasi dan Publik yang berkepentingan.

6 Pengembangan SDM Sertifikasi

Fungsi ini dijalankan melalui pendidikan dan pelatihan untuk master asesor, asesor lisensi, dan asesor kompetensi serta pemberian lisensi kepada para master asesor dan asesor.



Gambar 13. Customer Care BNSP



BAB III CAPAIAN KINERJA

Bab ini menguraikan capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh berbagai bidang di BNSP, meliputi Bidang Lisensi, Bidang Sertifikasi, Bidang Hukum dan Kerja Sama, Bidang Data dan Informasi, serta Bagian Umum. Penjabaran kinerja ini mencerminkan adanya peningkatan dan perbaikan secara bertahap dalam berbagai aspek pelayanan BNSP.

Setiap bidang di BNSP telah menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Bidang Lisensi, misalnya, terus meningkatkan proses penerbitan dan perpanjangan lisensi untuk lembaga sertifikasi profesi (LSP). Bidang Sertifikasi fokus pada peningkatan kualitas dan jumlah sertifikasi yang dikeluarkan, memastikan bahwa standar kompetensi terus terpenuhi.

Bidang Hukum dan Kerja Sama bekerja keras untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri, serta memastikan bahwa semua aktivitas BNSP sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bidang Data dan Informasi berupaya meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, Bagian Umum memastikan bahwa semua kebutuhan operasional dan administratif berjalan dengan lancar, mendukung kelancaran kerja seluruh bidang.

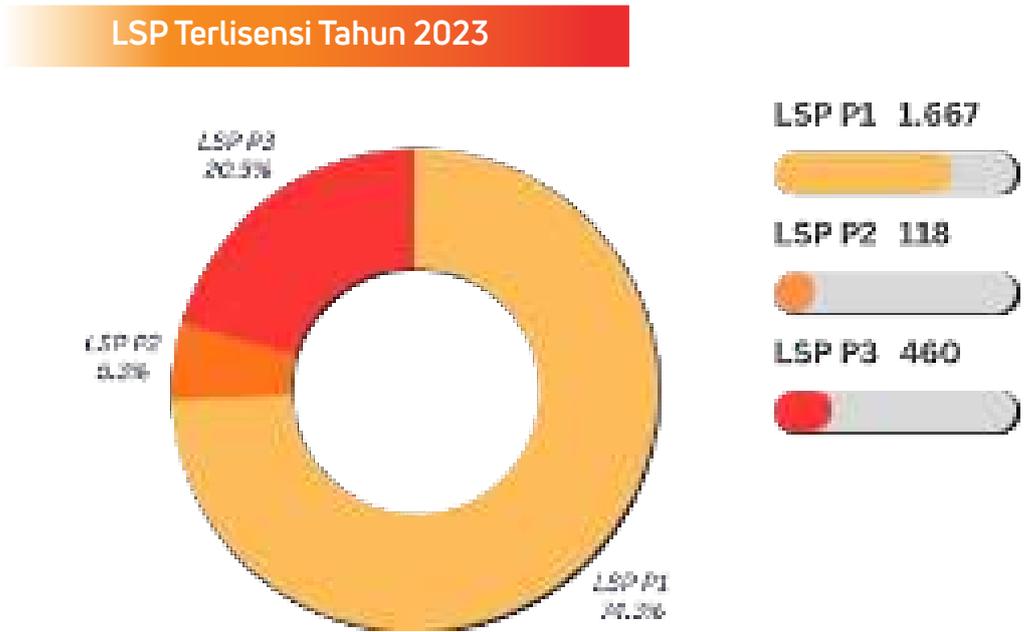
Secara keseluruhan, peningkatan aktivitas pelayanan ini mencerminkan komitmen BNSP dalam meningkatkan kualitas layanan dan kinerja untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi di Indonesia. Dengan perbaikan yang berkelanjutan ini, BNSP optimis dapat terus memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

A. Bidang Lisensi

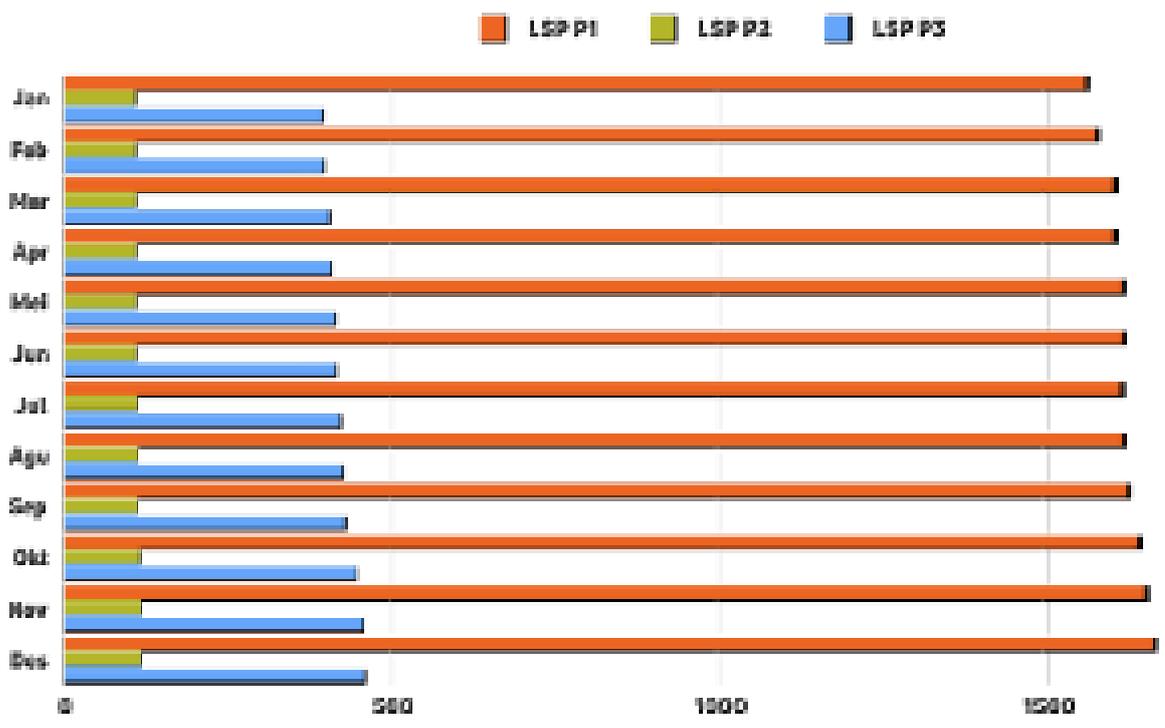
Bidang Lisensi adalah bagian penting dalam BNSP yang bertugas memastikan bahwa LSP yang ada di Indonesia beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Bidang Lisensi untuk meningkatkan kualitas dan akreditasi LSP di seluruh Indonesia. Capaian kinerja dalam bidang ini mencakup perkembangan LSP, perkembangan skema kompetensi, pelatihan dan lokakarya, serta kegiatan pendukung lainnya.

1. Perkembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Total jumlah LSP terlisensi hingga Desember 2023 adalah 2.245 LSP. Berikut perinciannya:



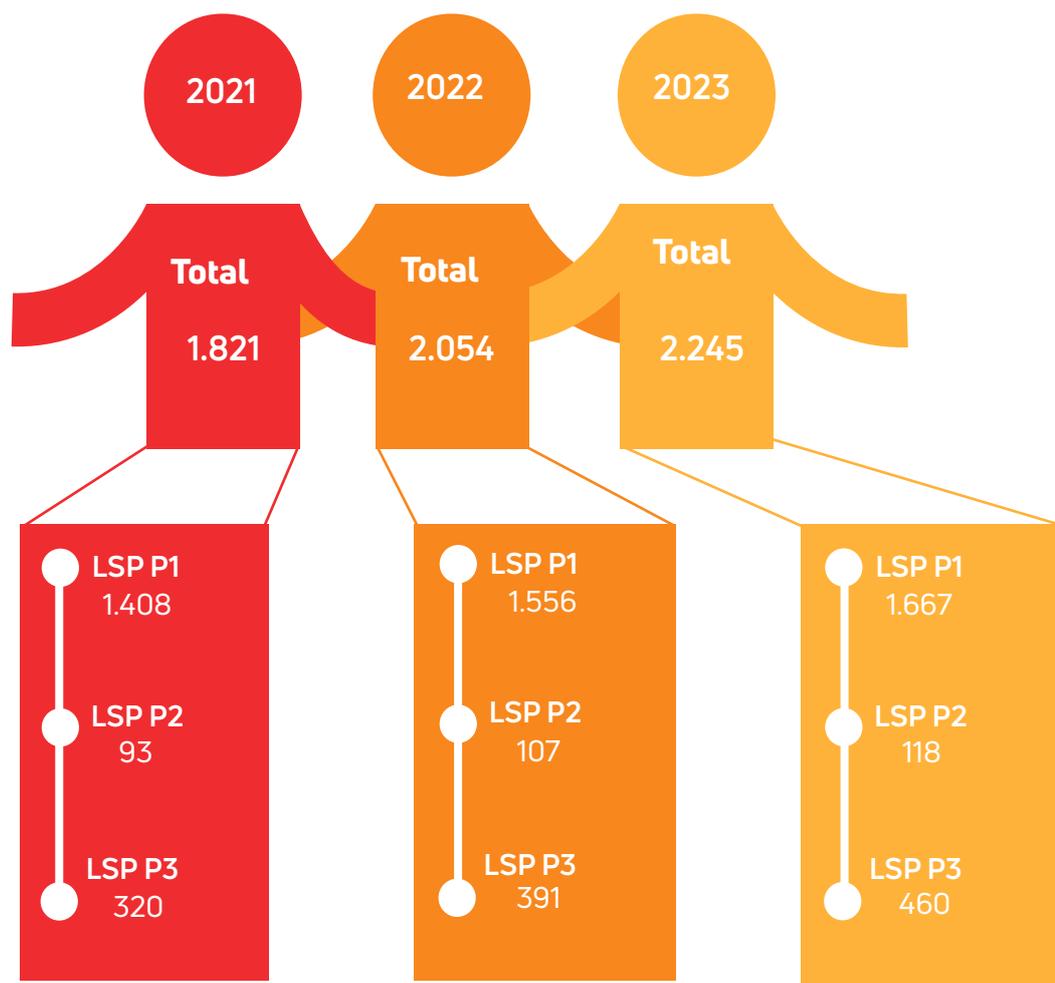
Perkembangan LSP Terlisensi Tahun 2023



Perkembangan LSP dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021, jumlah total LSP yang terlisensi mencapai 1.821, dengan distribusi 1.408 untuk LSP P1, 93 untuk LSP P2, dan 320 untuk LSP P3. Pada tahun 2022, angka ini meningkat menjadi 2.054 LSP terlisensi, dengan rincian 1.556 untuk LSP P1, 107 untuk LSP P2, dan 391 untuk LSP P3. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana jumlah total LSP terlisensi mencapai 2.245. Dari jumlah tersebut, 1.667 LSP P1, 118 LSP P2, dan 460 LSP P3.

Perkembangan positif ini tidak hanya menunjukkan bahwa lebih banyak LSP yang memenuhi standar sertifikasi, tetapi juga mencerminkan peningkatan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan sertifikasi di berbagai sektor. Untuk menjaga momentum ini, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas LSP secara berkelanjutan.

LSP Terlisensi Tahun 2021—2023





Gambar 14. Ketua BNSP Periode 2018—2023 Menyerahkan Sertifikat Lisensi Kepada LSP Konselor Keluarga Kreatif (LSP KKK) di Hilton Garden Inn Jakarta



Gambar 15. Penyerahan Sertifikat Lisensi LSP Wisata Indonesia oleh Anggota BNSP Periode 2018—2023, Bonardo Aldo Tobing, B.Sc., B.A.

a. Kegiatan Verifikasi LSP Baru

Kegiatan verifikasi LSP baru terdiri atas (1) apresiasi; (2) full assessment lisensi awal; dan (3) penyaksian uji kompetensi (*witness*) awal. Pada tahun 2023 lalu terdapat 95 pengajuan calon LSP (CLSP).

1) Apresiasi

Kegiatan apresiasi yang dilakukan berjumlah 95 pada tahun 2023. Melalui kegiatan apresiasi, BNSP memastikan bahwa LSP telah memahami esensi sertifikasi kompetensi, memiliki rencana skema yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, serta mampu memetakan calon asesi dalam jumlah yang memadai. Selain itu, apresiasi juga memastikan bahwa LSP telah mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan operasional LSP di masa mendatang.

2) Full Assessment Lisensi Awal

Terdapat 65 kegiatan *full assessment* (FA) lisensi awal yang dilaksanakan pada tahun 2023. Kegiatan ini merupakan proses penilaian untuk pemberian lisensi awal kepada CLSP yang telah memenuhi persyaratan. Pemberian lisensi awal ini penting untuk memastikan bahwa LSP baru dapat beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan siap untuk menjalankan tugas sertifikasi dengan baik.

3) Witness Awal

Terdapat 96 kegiatan *witness* awal sepanjang 2023. *Witness* merupakan penyaksian uji kompetensi perdana yang dilakukan oleh LSP guna memastikan bahwa LSP sudah menjalankan proses sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



Gambar 16. Full Asesment (FA) di Universitas Pendidikan Indonesia



Gambar 17. Penyaksian Uji kompetensi (*Witness*) LSP Denso Indonesia, Dihadiri Anggota BNSP, Miftakul Azis, M.H.

c. Relisensi LSP

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 18 lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang menjalani proses relisensi. Relisensi ini merupakan prosedur penting yang dilakukan untuk memperpanjang masa berlaku lisensi LSP yang telah habis. Proses tersebut untuk memastikan bahwa setiap LSP tetap memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan sebelum lisensinya diperpanjang. Adanya pengawasan ketat dalam proses relisensi ini tecermin dari jumlah kegiatan relisensi yang lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan lisensi awal. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kualitas dan kredibilitas LSP dalam menjalankan tugas sertifikasinya sehingga hanya LSP yang benar-benar memenuhi standar yang dapat terus beroperasi.



Gambar 18. Asesmen Relisensi LSP Universitas Bina Insani

d. Penambahan Ruang Lingkup LSP

Kegiatan *full assessment* (FA) penambahan ruang lingkup (PRL) berjumlah 49 pada tahun 2023. FA PRL merupakan proses penilaian oleh tim BNSP guna memastikan LSP sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BNSP untuk penambahan skema sertifikasi LSP. Kegiatan ini bertujuan menjaga kualitas layanan LSP dan memastikan kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku.

Selain pelaksanaan FA PRL, dilakukan juga *witness* PRL. Kegiatan tersebut dilakukan selama masa lisensi berlangsung. *Witness* PRL tahun 2023 dilaksanakan pada 99 LSP. Jumlah kegiatan *witness* yang tinggi menunjukkan komitmen BNSP dalam melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sertifikasi oleh LSP.

e. Surveilans LSP

Pada tahun 2023, surveilans terhadap LSP telah dilakukan secara menyeluruh pada 51 LSP di seluruh Indonesia. Surveilans ini merupakan bagian integral dari upaya BNSP untuk memastikan bahwa LSP terus mematuhi standar yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan kualitas sertifikasi yang diberikan kepada para profesional di berbagai sektor.



Gambar 19. Surveilans LSP Universitas Al Azhar Indonesia, Dihadiri Anggota BNSP Periode 2018—2023, Drs. Muhammad Zubair, M.Si. AIIS

f. Pembekuan dan Pencabutan Lisensi LSP

Berdasarkan tugas pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018, BNSP memiliki kewenangan untuk menindak LSP melalui pembekuan dan pencabutan lisensi. Pembekuan lisensi berarti penangguhan sementara, sedangkan pencabutan lisensi adalah penghapusan permanen izin operasional LSP.

Pembekuan atau pencabutan lisensi dapat dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain: (1) LSP tidak aktif atau berhenti melaksanakan kegiatan sertifikasi; dan (2) LSP melakukan pelanggaran berat yang melanggar Peraturan Kepala BNSP. Pada tahun 2023, terdapat satu LSP yang dikenai sanksi pembekuan dan pencabutan lisensi.

2. Perkembangan Skema Sertifikasi

Pada tahun 2022, terdapat 311 LSP yang mengajukan skema sertifikasi dengan jumlah skema yang diajukan sebanyak 349. Secara keseluruhan, terdapat 4.423 skema yang telah diverifikasi. Kemudian, skema sertifikasi pada tahun 2023 terjadi peningkatan. Sebanyak 220 LSP mengajukan skema sertifikasi sehingga kini total terdapat 1.300 skema hingga Juni 2023.

3. Pelatihan dan Lokakarya

Sepanjang tahun 2023, Bidang Lisensi telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, antara lain Pelatihan Pengelolaan Kelembagaan, Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu (SMM), Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen, dan *Upgrading Asesor Lisensi*.

a. Pelatihan Pengelolaan Kelembagaan

Pelatihan Pengelolaan Kelembagaan bertujuan meningkatkan kompetensi personel LSP dalam mengelola lembaga sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh BNSP. Pelatihan ini disusun untuk memastikan bahwa personel LSP memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas manajerial dan operasional secara efektif dan efisien.

Pelatihan ini diselenggarakan di dua lokasi utama, yaitu Hotel Mercure Gatot Subroto dan Hotel Wyndham Jakarta. Sepanjang tahun 2023, pelatihan ini dilaksanakan untuk delapan angkatan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Angkatan I dan II: Dilaksanakan pada tanggal 5–9 Juni 2023 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jl. Gatot Subroto Kav. 1 Jakarta.
- 2) Angkatan III dan IV: Dilaksanakan pada tanggal 12–16 Juni 2023 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jl. Gatot Subroto Kav. 1 Jakarta.
- 3) Angkatan V dan VI: Dilaksanakan pada tanggal 19–23 Juni 2023 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jl. Gatot Subroto Kav. 1 Jakarta.
- 4) Angkatan VII: Dilaksanakan pada tanggal 3–7 Juli 2023 di Hotel Wyndham Jakarta.



Gambar 20. Pelatihan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Angkatan V



Gambar 21. Pelatihan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Angkatan VII

Selain untuk meningkatkan aspek teknis pengelolaan kelembagaan, pelatihan ini juga untuk mengembangkan *soft skills* yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional LSP. Melalui pelatihan ini, BNSP berharap dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih andal dan profesional dalam mengelola LSP.



Gambar 22. Ketua BNSP Periode 2023 —2028 Menyerahkan Sertifikat Kompetensi Tatakelola, Risiko, dan Kepatuhan Tingkat Utama Kepada Menteri PPN/Bappenas

b. Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu (SMM) dilakukan untuk mencetak auditor yang kompeten dalam manajemen mutu, yang berfungsi sebagai *quality assurance* bagi LSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi. Para auditor dari hasil pelatihan ini diharapkan mampu memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, serta membantu LSP dalam meningkatkan kualitas layanan mereka.

Pelatihan ini diadakan di Hotel Mercure Gatot Subroto yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kav. 1 Jakarta. Lokasi ini dipilih karena fasilitasnya yang memadai dan lokasinya yang strategis sehingga mendukung pelaksanaan pelatihan yang efektif dan nyaman. Pelatihan ini dilaksanakan untuk Angkatan I dan II yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 26 Mei 2023.



Gambar 23. Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu Angkatan II

c. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen

Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen bertujuan meningkatkan kompetensi personel LSP dalam menyusun dokumen sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh BNSP. Pelatihan ini dirancang untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan oleh LSP memenuhi standar yang diperlukan untuk pelaksanaan sertifikasi yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan bimbingan teknis ini dilakukan secara daring (*online*), sehingga peserta dari berbagai lokasi bisa ikut berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik. Pelatihan ini dilaksanakan dalam beberapa angkatan pada bulan Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Angkatan I dan II: Dilaksanakan pada tanggal 20–21 Februari 2023.
- 2) Angkatan III dan IV: Dilaksanakan pada tanggal 22–23 Februari 2023.
- 3) Angkatan V: Dilaksanakan pada tanggal 24–25 Februari 2023.



Gambar 24. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen LSP Angkatan V

Selama bimbingan teknis ini, peserta dibekali dengan berbagai materi yang mencakup teknik penyusunan dokumen yang sesuai dengan standar BNSP, cara mengidentifikasi dan memitigasi kesalahan dalam dokumen, serta penggunaan alat dan teknologi yang dapat mendukung proses dokumentasi. Pelatihan ini juga memberikan panduan praktis dan contoh konkret untuk membantu peserta memahami dan mengaplikasikan materi yang disampaikan.

Bimbingan teknis ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan personel LSP dalam menyusun dokumen yang berkualitas, sehingga akan mendukung kelancaran proses sertifikasi dan meningkatkan kredibilitas LSP.

d. *Upgrading* Asesor Lisensi

Kegiatan *Upgrading* Asesor Lisensi bertujuan memastikan kelancaran pelaksanaan asesmen dalam rangka pemberian lisensi dari BNSP kepada LSP. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kompetensi para asesor dalam menjalankan tugas asesmen sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh BNSP. Dengan adanya *upgrading* ini, diharapkan proses pemberian lisensi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai standar yang berlaku.

Upgrading diselenggarakan di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto, berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1, RT.2/RW.2, Kota Jakarta Selatan. Kegiatan *upgrading* ini dilaksanakan untuk tiga angkatan sepanjang tahun 2023:

- 1) Angkatan I dan II: Dilaksanakan pada tanggal 7–9 Maret 2023.
- 2) Angkatan III: Dilaksanakan pada tanggal 10–12 Juli 2023.

Dengan mengikuti *upgrading* ini, para asesor diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka dalam melaksanakan asesmen. Peningkatan kompetensi ini akan mendukung kelancaran proses pemberian lisensi, dan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas LSP secara keseluruhan. BNSP berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperkuat kemampuan para asesor melalui program-program pelatihan dan *upgrading* yang berkesinambungan.



Gambar 25. Kegiatan *Upgrading* Asesor Lisensi Angkatan I & II

B. Bidang Sertifikasi

Kinerja Bidang Sertifikasi pada tahun 2023 menunjukkan berbagai perkembangan yang signifikan. Hal ini mencakup beberapa aspek penting seperti jumlah asesi yang telah tersertifikasi, pelatihan asesor kompetensi, program pengakuan kompetensi terkini (*recognition of current competency/RCC*), Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK), serta pelatihan untuk master asesor dan *lead asesor*. Selain itu, kinerja ini juga meliputi penyelenggaraan lokakarya untuk master asesor, pelaksanaan sertifikasi *Certified Master Assessor (CMA)*, dan pengumpulan data terkait master asesor.

2022	1.037.404
2023	1.231.931
Total	8.452.913

Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 18,73% dibandingkan dengan tahun 2022. Total asesi tersertifikasi 2006-2023 sebanyak 8.452.913.



Gambar 26. Penyerahan Sertifikat Kompetensi pada Momen Wisuda Universitas Pamulang

1. Sertifikasi Kompetensi 2023

Pada tahun 2023, jumlah asesi yang berhasil tesertifikasi mencapai 1.231.931 orang. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 18,73% dibandingkan dengan tahun 2022. Saat itu jumlah asesi tesertifikasi adalah 1.037.404 orang. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dari BNSP dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses sertifikasi kompetensi di Indonesia.

Peningkatan jumlah asesi tesertifikasi ini menjadi beberapa faktor kunci. Pertama, BNSP telah meningkatkan jumlah dan kualitas program pelatihan serta kegiatan bimbingan teknis untuk para asesor dan LSP. Program-program ini dihadirkan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sehingga lebih banyak asesi dapat mengikuti dan lulus sertifikasi.

Kedua, peningkatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, industri, dan lembaga pendidikan, telah membantu memperluas jangkauan dan penerimaan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Kolaborasi ini memungkinkan lebih banyak individu dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui secara nasional dan internasional. Selain itu, penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam proses sertifikasi juga berkontribusi pada peningkatan jumlah asesi tesertifikasi.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah asesi tesertifikasi pada tahun 2023 mencerminkan keberhasilan strategi BNSP dalam memperkuat sistem sertifikasi kompetensi di Indonesia. Dengan terus meningkatkan kualitas dan efisiensi proses sertifikasi, BNSP berkomitmen untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar industri dan mampu bersaing di pasar global.

PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) 2023



Capaian Program PSKK 2023

- Target: 2.674 paket PSKK untuk 53.480 asesi
- Realisasi: 5.671 paket PSKK mencakup 113.420 asesi
- Setiap paket melibatkan 20 asesi dan 2 asesor

01

Proses Sosialisasi dan Verifikasi

- Sosialisasi *offline* di Surabaya, Serang, Semarang, Bekasi dan *online* pada 6–18 Februari 2023
- Verifikasi proposal PSKK oleh LSP dan penetapan 524 LSP dengan 2.674 paket PSKK

02

Monitoring Kualitas Uji

- Anggaran untuk 100 paket perjalanan monitoring
- Setiap paket terdiri atas 2 asesor
- Monitoring dalam dua tahap, yakni persiapan/pelaksanaan dan pelaporan

03

Komitmen BNSP

- Kegiatan PSKK tahun 2023 berlangsung selama sembilan bulan, dari April hingga Desember 2023.
- Dengan pendekatan yang komprehensif ini, BNSP berupaya memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan PSKK berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

04

2. Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK)

Sejak pertama kali diluncurkan, Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) telah menjadi salah satu program yang signifikan dalam mendorong akselerasi sertifikasi kompetensi kerja setiap tahunnya. Pada tahun 2023, pemerintah menganggarkan sebanyak 2.674 paket PSKK untuk mengakomodasi 53.480 asesi. Namun, realisasi yang tercapai jauh melampaui target dengan total 5.671 paket PSKK, yang mencakup 113.420 asesi. Setiap paket kegiatan diikuti oleh 20 asesi dan diuji oleh dua orang asesor.

Proses pelaksanaan PSKK disertai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara *offline* di empat kota, yaitu Surabaya, Serang, Semarang, dan Bekasi, serta secara *online* pada tanggal 6 hingga 18 Februari 2023. Setelah sosialisasi, LSP mengumpulkan proposal PSKK yang kemudian diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi dan pleno penetapan, komite panitia program PSKK memutuskan untuk menetapkan 524 LSP dengan total 2.674 paket PSKK.

Untuk menjamin kualitas proses uji dalam kegiatan PSKK, BNSP mengalokasikan anggaran untuk 100 paket perjalanan monitoring, dengan masing-masing paket terdiri atas dua petugas monitoring. Monitoring tersebut dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan/pelaksanaan dan tahap pelaporan.

Kegiatan PSKK tahun 2023 berlangsung selama sembilan bulan, dari April hingga Desember 2023. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, BNSP berupaya memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan PSKK berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.



Gambar 27. Penandatanganan Program PSKK Tahun 2023 bersama dengan LSP Seluruh Indonesia

3. Pelatihan Asesor Kompetensi

Pelatihan Asesor Kompetensi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para asesor, serta menyelaraskan pandangan dan penilaian dalam pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan, termasuk pengembangan lembaga sertifikasi profesi (LSP).

a. Anggaran APBN

Pelatihan ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup 6 paket pelatihan yang berlangsung dari bulan Maret hingga Juli 2023.

b. Anggaran Mandiri (LSP)

Selama tahun 2023, terdapat 284 pelatihan asesor kompetensi yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran mandiri. Pelatihan-pelatihan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari LSP untuk secara aktif berinvestasi dalam pengembangan kompetensi asesor mereka.



Gambar 28. Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Polisi Republik Indonesia (LSP Polri)



Gambar 29. Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Pertanian Organik (LSPPO)

4. *Recognition of Current Competency (RCC) Asesor Kompetensi*

Program *Recognition of Current Competency (RCC)* atau sertifikasi ulang bagi asesor kompetensi dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para asesor, serta menyelaraskan pandangan dan penilaian dalam pelaksanaan uji kompetensi dan pengembangan LSP.

a. Anggaran APBN

Program RCC ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup 7 paket pelatihan yang dilaksanakan dari bulan April hingga Agustus 2023.

b. Anggaran Mandiri

Selama tahun 2023, terdapat 220 RCC yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran mandiri. Hal ini menunjukkan inisiatif dan komitmen dari LSP untuk mendukung pengembangan kompetensi asesor mereka secara mandiri.



Gambar 30. *Recognition of Current Competency (RCC) LSP* Universitas Bina Sarana Informatika (BSI)



Gambar 31. *Recognition of Current Competency (RCC) LSP* Universitas Sebelas Maret (UNS)

Dalam rangka memperkuat kelembagaan, memberdayakan LSP, dan menambah jumlah asesor, serta untuk menjamin pelaksanaan penilaian yang kompeten dan kredibel, BNSP menyelenggarakan RCC Asesor Kompetensi Angkatan 9 dengan dana yang berasal dari anggaran DIPA Sekretariat BNSP Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan RCC Asesor Kompetensi Angkatan 9 ini berlangsung selama dua hari, dari tanggal 15 hingga 16 September 2023, bertempat di Hotel ASTON Tropicana Bandung, Jl. Cihampelas No.125 - 127, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131.

Peserta RCC Asesor Kompetensi Angkatan 9 adalah asesor kompetensi yang masa berlaku sertifikatnya telah habis. Peserta berasal dari LSP yang telah terlisensi BNSP dan calon LSP yang belum terlisensi BNSP, tetapi skema yang digunakan telah diverifikasi BNSP, dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.



Gambar 32. Interaksi Peserta RCC dengan Master Asesor pada Penyelenggaraan RCC Asesor Kompetensi Angkatan 9

5. *Recognition of Current Competency (RCC) Master Asesor Kompetensi*

BNSP menyelenggarakan RCC Master Asesor dan Uji Kompetensi Calon Master Asesor pada tanggal 6 hingga 7 November 2023 di Gedung BNSP. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kredibilitas asesor melalui serangkaian evaluasi yang komprehensif. Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BNSP dalam memastikan bahwa asesor yang terlibat dalam proses sertifikasi kompetensi terstandarisasi dengan baik.

Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua BNSP, Miftakul Azis, M.H., dan dihadiri oleh 15 master asesor serta 45 calon master asesor. Kegiatan pembukaan mencakup sambutan yang menekankan pentingnya peran master asesor dalam menjaga integritas dan kualitas sertifikasi kompetensi. Para peserta, baik master asesor yang sudah berpengalaman maupun calon master asesor, mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga dapat memperkaya proses pembelajaran dan penilaian.



Gambar 33. RCC Master Asesor & Calon Master Asesor di Gedung BNSP

Peserta uji kompetensi master asesor adalah mereka yang telah menyelesaikan pelatihan master asesor dan mengikuti program magang master asesor. Proses uji kompetensi ini diselenggarakan untuk mengukur kemampuan peserta dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi nyata. Dengan demikian, lulusan uji kompetensi ini diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan kompetensi tinggi, berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor.

6. *Workshop* Master Asesor Kompetensi

Workshop Master Asesor Kompetensi bertujuan memastikan bahwa para master asesor dapat menjalankan peran mereka sebagai penjamin mutu asesor kompetensi dengan lebih fokus dan efektif, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan pelatihan ini, diharapkan Sistem Sertifikasi Kompetensi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Selain itu, melalui kegiatan ini, BNSP berupaya memperkuat pemahaman peserta tentang pentingnya standar sertifikasi kompetensi dalam menghadapi tantangan global di dunia kerja.

Acara *workshop* yang diselenggarakan pada 16 November 2023 secara resmi dibuka oleh Ketua BNSP periode terbaru, 2023—2028, Syamsi Hari, S.E., M.M., yang didampingi oleh Anggota BNSP lainnya. Pembukaan ini diawali dengan sesi perkenalan dan silaturahmi yang melibatkan 220 peserta, terdiri atas master asesor kompetensi dan calon master asesor kompetensi.



Gambar 34. *Workshop* Master Asesor Kompetensi dihadiri Ketua, Anggota, dan Sekretariat BNSP Periode 2023—2028



Gambar 35. *Workshop* Master Asesor Kompetensi Diselenggarakan di Novotel Jakarta Mangga Dua Square

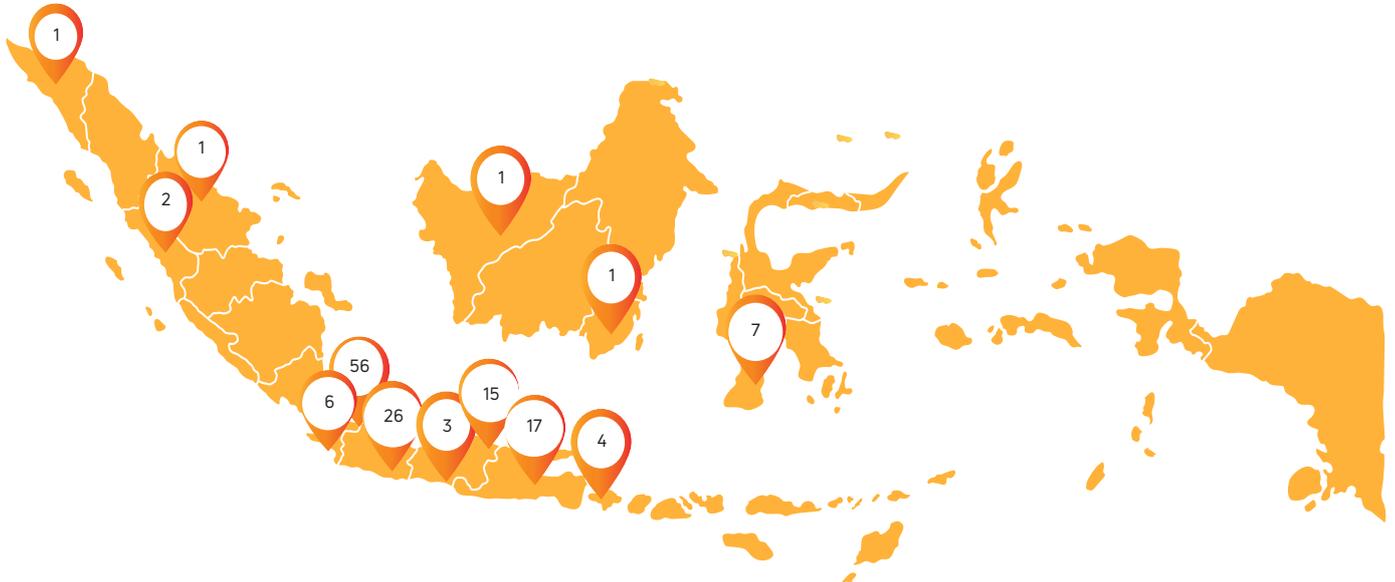


Gambar 36. Ketua BNSP Periode Terbaru, 2023—2028, Syamsi Hari, S.E., M.M., Membuka Langsung Kegiatan *Workshop* Master Asesor Kompetensi

7. Data Master Asesor Kompetensi

Berikut adalah data master asesor kompetensi tahun 2023.

Master Asesor 2023 Total 140



Provinsi	Jumlah
DI Aceh	1
Sumatra Utara	0
Sumatra Barat	2
Riau	1
Kepulauan Riau	0
Bengkulu	0
Jambi	0
Kep. Bangka Belitung	0
Sumatra Selatan	0
Lampung	0
Banten	6
DKI Jakarta	56
Jawa Barat	26
Jawa Tengah	15
Jawa Timur	17
DI Yogyakarta	3
Bali	4
Nusa Tenggara Barat	0
Nusa Tenggara Timur	0

Provinsi	Jumlah
Kalimantan Barat	1
Kalimantan Utara	0
Kalimantan Tengah	0
Kalimantan Timur	0
Kalimantan Selatan	1
Sulawesi Barat	0
Sulawesi Selatan	7
Sulawesi Tengah	0
Sulawesi Tenggara	0
Sulawesi Utara	0
Gorontalo	0
Maluku	0
Maluku Utara	0
Papua	0
Papua Barat	0
Papua Selatan	0
Papua Tengah	0
Papua Pegunungan	0
Papua Barat Daya	0

C. Bidang Hukum dan Kerja Sama

Kinerja Bidang Hukum dan Kerja Sama mencerminkan perkembangan signifikan dalam kebijakan BNSP serta kolaborasi yang semakin erat dengan berbagai pihak. Bidang ini berperan penting dalam merumuskan dan memperbarui kebijakan yang relevan dengan standar kompetensi nasional, memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sejalan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Kebijakan yang dibuat tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga untuk memastikan bahwa standar kompetensi yang diterapkan dapat diterima dan diakui secara internasional.

Selain itu, Bidang Hukum dan Kerja Sama aktif dalam menjalin kemitraan strategis melalui penandatanganan berbagai dokumen kerja sama. Dokumen-dokumen ini meliputi berita acara, perjanjian kerja sama, dan nota kesepahaman yang menjadi landasan bagi implementasi berbagai program dan kegiatan bersama. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas LSP hingga pengembangan kurikulum dan pelatihan bagi asesor kompetensi. Melalui kemitraan ini, BNSP dapat memperluas jangkauan dan dampaknya, memastikan bahwa program sertifikasi kompetensi dapat diakses oleh lebih banyak tenaga kerja di berbagai sektor.

Dengan adanya kerja sama yang solid dan kebijakan yang adaptif, BNSP mampu menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika pasar kerja yang terus berubah. Kinerja Bidang Hukum dan Kerja Sama yang efektif memungkinkan BNSP untuk terus meningkatkan kualitas sertifikasi kompetensi dan menjaga kredibilitasnya di mata industri dan masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi BNSP sebagai lembaga sertifikasi terdepan di Indonesia, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

1. Kerja Sama Antarlembaga/Kementerian

Sepanjang tahun 2023, BNSP telah menandatangani dokumen kerja sama, yakni dengan TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

a. TNI Angkatan Udara (TNI AU)

Kerja sama dengan TNI AU bertujuan mendukung proses rekrutmen dan seleksi calon Bintara, serta membentuk LSP P2 TNI AU. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan standar kompetensi dan profesionalisme prajurit, memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan standar nasional. Dengan adanya LSP P2 TNI AU, prajurit yang terpilih akan mendapatkan pengakuan formal atas kompetensi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kredibilitas TNI AU sebagai institusi pertahanan.

b. Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim berfokus pada peningkatan dan pengembangan profesi sumber daya manusia di daerah tersebut. Melalui program pelatihan dan sertifikasi yang disusun secara khusus, BNSP berupaya meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal.



Gambar 37. BNSP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Menandatangani Perjanjian Kerja Sama



Gambar 38. Kerja Sama BNSP dengan TNI Angkatan Udara

2. Kerja Sama Bilateral

a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong

Pada tanggal 21 Desember 2023, delegasi BNSP mengunjungi Kantor KJRI Hong Kong untuk mempererat kerja sama dalam bidang sertifikasi kompetensi. Delegasi yang dipimpin oleh Ketua BNSP, Syamsi Hari, disambut dengan hangat oleh Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Yul Edison. Pertemuan ini bertujuan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Hong Kong dalam meningkatkan kualitas dan pengakuan profesionalisme tenaga kerja Indonesia, khususnya bagi pekerja migran yang bekerja di Hong Kong dan Makau.

Selama pertemuan, beberapa langkah strategis disepakati untuk mengembangkan sertifikasi profesi di Indonesia. Salah satu inisiatif utama adalah rencana penyediaan TUK di Hong Kong, yang akan memungkinkan pekerja migran untuk mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi yang diakui secara nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja migran Indonesia, memberikan mereka pengakuan formal atas kompetensi yang dimiliki, dan membuka peluang lebih luas di pasar kerja internasional.

Selain itu, delegasi BNSP juga bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di lokasi yang sama. Pertemuan ini membahas harmonisasi dan koordinasi dalam penanganan sertifikasi profesi, memastikan bahwa upaya sertifikasi berjalan sejalan dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan nasional. Kunjungan ini juga dihadiri oleh anggota BNSP, NS. Aji Martono dan Amilin, serta pejabat dari lingkungan Sekretariat BNSP, menandai komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas dan pengakuan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.



Gambar 39. Delegasi BNSP dan KJRI Hongkong Dorong Sinergi di Bidang Pelatihan Kerja

b. Kedutaan Besar Republik Indonesia Korea Selatan

BNSP, dalam menjalankan perannya untuk menjamin mutu kompetensi tenaga kerja Indonesia, melakukan kunjungan ke Korea Selatan pada 29 hingga 31 Desember 2023. Kunjungan dimulai dengan penyambutan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, diterima oleh KUI KBRI Seoul, Zelda Wulan Kartika, yang menyambut baik kedatangan BNSP dan berharap peran BNSP dapat diperluas untuk seluruh PMI di Korea Selatan.

Wakil Ketua BNSP, Ulfah Mashfufah, menyatakan kepuasannya atas kunjungan ini, yang memperkuat pemahaman tentang peran strategis BNSP dalam menjaga kualitas kompetensi PMI di Korea Selatan. Ia berharap BNSP dapat memperluas perannya dalam sertifikasi kompetensi bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Korea Selatan. Diskusi antara BNSP dan KBRI menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mengembangkan pendidikan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia, serta membuka peluang kerja baru yang ditawarkan oleh pemerintah Korea Selatan.

Anggota BNSP, Adi Mahfudz Wuhadji dan Muhammad Nur Hayid, menekankan pentingnya peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan. Mereka menekankan komitmen BNSP untuk memastikan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui sertifikasi kompetensi dan menyarankan langkah-langkah strategis agar lowongan pekerjaan dari Korea Selatan dapat diisi dengan baik oleh tenaga kerja terlatih dari Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan pasar kerja yang kompeten melalui uji kompetensi dan sertifikasi, memperkuat hubungan positif antara kedua negara melalui pengakuan kompetensi tenaga kerja Indonesia.



Gambar 40. Delegasi BNSP dan KJRI Hongkong Dorong Sinergi di Bidang Pelatihan Kerja



Gambar 41. Delegasi BNSP Berkunjung ke KBRI Seoul Membahas Sertifikasi Profesi Tenaga Kerja

3. Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian/Lembaga

Sepanjang tahun 2023, BNSP telah mengadakan berbagai harmonisasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional. Pada tanggal 5 Januari 2023, BNSP dan Kemenparekraf/Baparekraf bertemu di Gedung BNSP, Jakarta, untuk menyelaraskan sistem sertifikasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian, pada tanggal 1 Februari 2023, BNSP bekerja sama dengan BIG dan Kemen PUPR untuk mengharmonisasi sertifikasi kompetensi di bidang geospasial, serta dengan kementerian/lembaga lintas sektor untuk meningkatkan mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang konstruksi. Selanjutnya, pada 7 Februari 2023, BNSP dan Kemnaker melaksanakan rapat harmonisasi untuk pelatihan vokasi. Rangkaian pertemuan ini menunjukkan komitmen BNSP dalam menciptakan standar sertifikasi yang konsisten dan diakui secara nasional, guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

a. Kemenparekraf/Baparekraf

BNSP dan Kemenparekraf/Baparekraf mengadakan rapat harmonisasi untuk penyelarasan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional pada tanggal 5 Januari 2023 di Gedung BNSP, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tiga pokok utama, yaitu:

- 1) harmonisasi Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 2) penetapan dan penyelarasan acuan referensi untuk mengembangkan skema sertifikasi KKNi, okupasi, dan klaster di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- 3) pembaruan pelaksanaan penerapan Toolbox ASEAN di BNSP serta langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan bersama Kemenparekraf/Baparekraf.



Gambar 42. BNSP dan Kemenparekraf/Baparekraf Mengelenggarakan Harmonisasi Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional

b. Badan Informasi Geospasial (BIG) & Kementerian PUPR

Pada tanggal 1 Februari 2023, BNSP bersama BIG dan Kementerian PUPR, mengadakan rapat harmonisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang geospasial di Gedung BNSP, Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua BNSP, Bapak Miftakul Azis, dan membahas penyelarasan skema sertifikasi survei terestris. Pertemuan ini dihadiri oleh anggota BNSP, pejabat dari Sekretariat BNSP, serta perwakilan dari BIG dan Kementerian PUPR.



Gambar 43. Anggota BNSP, Miftakul Azis Menyampaikan Materinya pada Agenda Harmonisasi BNSP bersama BIG dan Kemen PUPR

c. Kementerian/Lembaga Lintas Sektor

BNSP bersama K/L lintas sektor mengadakan rapat harmonisasi di Gedung BNSP untuk meningkatkan penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang konstruksi. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua BNSP, Kunjung Masehat, yang membahas persyaratan sertifikasi di bidang konstruksi untuk LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua dan Anggota BNSP, serta perwakilan dari Kemenko PMK, Kemen PUPR, Kemnaker, Kemendikbudristek, dan Kadin Indonesia, yang semuanya berkontribusi dalam diskusi strategis ini.



Gambar 44. BNSP dan K/L Lintas Sektor Melakukan Harmonisasi Persyaratan Sertifikasi Bidang Konstruksi

d. Kementerian/Lembaga Lintas Sektor

BNSP dan Kemnaker mengadakan rapat harmonisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang pelatihan vokasi pada 7 Februari 2023, di Gedung BNSP. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua BNSP, Bapak Miftakul Azis, dan membahas beberapa pokok penting, antara lain:

- 1) pelaksanaan sertifikasi oleh LSP BPVP Kemnaker;
- 2) percepatan lisensi LSP BLK Belitung dan BLK Pangkep;
- 3) persyaratan skema sertifikasi di bidang pelatihan; dan
- 4) program sertifikasi kompetensi dengan anggaran dari Kemnaker.



Gambar 45. Harmonisasi BNSP dan Kemnaker di Bidang Pelatihan Vokasi

4. Diseminasi dan Penyusunan Peraturan BNSP

Bidang Hukum fokus pada diseminasi peraturan BNSP dengan *refocusing* pada aturan yang ada. Penyusunan peraturan juga dilakukan dengan revisi terhadap beberapa pedoman, yaitu Pedoman 201, 202, 208, 210, 301, dan 302.

5. Advokasi

Advokasi yang dilakukan oleh BNSP bertujuan memelihara kinerja dan menjamin mutu LSP dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP. Langkah ini juga dimaksudkan untuk membantu LSP mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan advokasi yang tepat, LSP dapat memastikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga hasil sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan dapat dipercaya dan diakui.

Pada 10 Januari 2023, advokasi dilakukan di LSP Ekspor Impor Indonesia (LSP EII), yang berlokasi di Jl. S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Tim advokasi yang terdiri atas Bonardo Tobing, Kurniawati, dan Arifatun Nurjanah, bertugas mengidentifikasi dan memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh LSP EII. Kegiatan ini juga mencakup pemantauan langsung terhadap pelaksanaan uji kompetensi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan LSP EII.

Selanjutnya, pada 4 Mei 2023, advokasi dilaksanakan di LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR), yang berlokasi di Gandaria 8 Office Tower, Jl. Arteri Pd. Indah No. 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tim advokasi yang terdiri atas Tetty Desiarti S., Fazriyana, dan Triyono, berfokus memastikan bahwa LSP BSMR dapat menjalankan uji kompetensi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh BNSP. Dalam pertemuan ini, tim advokasi juga memberikan bimbingan dan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi, serta menjamin bahwa LSP BSMR dapat memenuhi standar yang diharapkan dalam penilaian kompetensi manajemen risiko.

6. Sosialisasi Indonesia Kompeten

BNSP terus aktif menyosialisasikan program Indonesia Kompeten dengan beberapa tujuan utama, yakni 1) memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan mengenai kebijakan sertifikasi kompetensi kerja nasional; 2) menjelaskan kepada masyarakat tentang peran LSP dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja; dan 3) mendorong pengakuan kompetensi sumber daya manusia Indonesia di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama para pekerja, dalam sertifikasi kompetensi. Sosialisasi ini dilaksanakan di berbagai kota untuk mencapai audiens yang lebih luas. Pada tahun 2023, program ini dilaksanakan di lima lokasi berbeda, yaitu:

- 1) Semarang pada 7 Maret 2023 di Gumaya Tower Hotel,;
- 2) Medan pada 14 Maret 2023 di Adimulia Hotel Medan;
- 3) Bekasi pada 21 Maret 2023 di Hotel Horison Ultima;
- 4) Samarinda pada 5 April 2023 di Hotel Mercure Samarinda; dan
- 5) Makassar pada 8 Juni 2023 di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla.

Peserta kegiatan sosialisasi terdiri dari berbagai pihak terkait, termasuk dinas-dinas terkait, asosiasi profesi dan industri, industri, perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan (SMK), balai latihan kerja (BLK) dan BLK Komunitas, serta lembaga pelatihan kerja (LPK).



Gambar 46. Sosialisasi Program Indonesia Kompeten



Gambar 47. Kolase Kegiatan Sosialisasi Indonesia Kompeten 2023 di Lima Kota (Semarang, Medan, Bekasi, Samarinda dan Makassar)

D. Bidang Data dan Informasi

Kinerja Bidang Data dan Informasi sepanjang tahun 2023 mencakup beberapa kegiatan dan pengembangan, yaitu Sosialisasi Pengelolaan Data Sistem Informasi BNSP, Pelatihan Pengelolaan Akun LSP, pameran, dan promosi.

1. Sosialisasi Pengelolaan Data Sistem Informasi BNSP

Pada tahun 2023, telah diselenggarakan enam paket Sosialisasi Pengelolaan Data Sistem Informasi BNSP di tiga lokasi, yaitu Denpasar, Surabaya, dan Bandung. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan cara penggunaan sistem informasi BNSP yang baru kepada LSP. Setiap lokasi mengadakan dua paket sosialisasi, dengan masing-masing paket dihadiri oleh 50 peserta, sehingga total peserta di setiap kota mencapai 100 orang. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengenalan sistem baru, tetapi juga memberikan panduan praktis dan solusi atas berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh LSP dalam mengakses dan mengelola data sertifikasi.

Tabel 4. Pembagian Paket Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Data Sistem Informasi BNSP

Lokasi	Jumlah Paket	Total Peserta	Tanggal
Denpasar	2 pake x 50 orang	100 orang	12 Desember 2023
Surabaya	2 pake x 50 orang	100 orang	15 Desember 2023
Bandung	2 pake x 50 orang	100 orang	19 Desember 2023



Gambar 48. Anggota Bidang Data dan Informasi, Nurwijoyo Satrio Aji Martono, S.H.I Menyampaikan Materinya pada Sosialisasi Sistem Informasi BNSP Tahun 2023



Gambar 49. Anggota Bidang Hukum dan Kerja Sama, Prof. Dr. Amilin, S.E., M.Si. Memaparkan Materi Sosialisasi Sistem Informasi BNSP Tahun 2023



Gambar 50. Sosialisasi Sistem Informasi BNSP 2023

2. Pelatihan Pengelolaan Akun LSP

BNSP telah melaksanakan 51 sesi Pelatihan Pengelolaan Akun LSP pada Sistem Informasi BNSP dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam kepada LSP tentang cara penggunaan sistem informasi BNSP secara efektif. Kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan teknis para peserta dalam mengelola akun mereka, memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan semua fitur yang tersedia dalam sistem informasi BNSP dengan optimal. Pelatihan ini juga berfokus pada pemecahan masalah yang mungkin dihadapi oleh LSP dalam pengelolaan data mereka sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan sertifikasi kompetensi secara keseluruhan.



Gambar 51. Pelatihan Pengelolaan Akun bersama LSP

3. Pameran

Pameran bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai manfaat yang bisa diperoleh dengan memiliki sertifikasi profesi, baik bagi mereka yang berpendidikan formal, *fresh graduate*, maupun tenaga kerja berpengalaman. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat menghasilkan lebih banyak tenaga kerja yang kompeten. Pada tahun 2023, BNSP telah mengadakan pameran di Jombang Job Fair yang diadakan di Aula SMKN 1 Jombang pada tanggal 20 Juni 2023 dan Festival Pelatihan Vokasi di Jakarta International Expo pada 27 hingga 29 Oktober 2023.

Pada *booth* BNSP, beberapa layanan yang diberikan kepada pengunjung meliputi:

- a) informasi terkait Lisensi LSP;
- b) validasi profil dan skema sertifikasi LSP di sistem informasi BNSP; dan
- c) informasi mengenai sertifikasi kompetensi pelatihan asesor kompetensi (Askom) dan RCC Askom.



Gambar 52. Pameran BNSP pada *Event Job Fair* Tahun 2023

4. Promosi

Bidang Data dan Informasi juga melaksanakan promosi BNSP agar sertifikasi kompetensi semakin dikenal luas oleh masyarakat. Pada tahun ini, kegiatan promosi melibatkan pembuatan video wawancara dengan LSP P1, P2, dan P3 serta testimoni dari para pemangku kepentingan. Video tersebut ditayangkan di kanal YouTube BNSP.



Gambar 53. Ngobrol Kompeten (Ngonten) di Jombang Job Fair 2023



Gambar 54. Ngobrol Kompeten (Ngonten) bersama LSP MSDM

E. Bagian Umum

Bagian Umum sebelumnya tergabung dengan Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum hingga tahun 2022. Namun, pada tahun 2022, Bagian Umum dipisahkan dan menjadi unit mandiri. Kinerja Bagian Umum menggambarkan kegiatan tahun 2023 yang mencakup (1) penggunaan sumber daya anggaran sertifikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia; (3) korespondensi; (4) perubahan struktur organisasi; dan (5) pengelolaan sarana dan prasarana.

1. Penggunaan Anggaran Sumber Daya Sertifikasi

BNSP mengelola sumber daya anggaran dengan cermat untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif. Pagu anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk mendukung berbagai inisiatif dan proyek yang dijalankan oleh BNSP. Realisasi anggaran dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengeluaran.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM merupakan prioritas utama BNSP untuk memastikan bahwa para pegawai memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung operasional dan mencapai tujuan strategis lembaga. Sepanjang tahun 2023, BNSP telah melaksanakan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai. Berikut ini adalah beberapa Bimtek yang diikuti oleh pegawai BNSP.

a. Bimtek *e-Performance*

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem *e-performance*, yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja secara efektif dan efisien.

b. Bimtek Pengelola Keuangan

Bimtek ini difokuskan pada peningkatan keterampilan dalam pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

c) Bimtek Aplikasi SAKTI Modul Persediaan, Aset Tetap, dan Pelaporan

Bimtek ini memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan aplikasi SAKTI untuk mengelola persediaan, aset tetap, dan pelaporan yang akurat.

d) Bimtek Pengarsipan, Pengadaan, dan Keuangan

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengarsipan dokumen, proses pengadaan, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e) Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN dan Laporan Tahun 2023

Bimtek ini difokuskan pada penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN), serta laporan semesteran yang tepat waktu dan akurat.

f) Bimtek Penyusunan Laporan BMN di Lingkungan Ditjen Binalavotas

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai dalam menyusun laporan BMN sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ditjen Binalavotas.

3. Korespondensi

Bidang Umum di BNSP memiliki peran penting dalam mengelola surat-menyurat resmi, terutama yang berkaitan dengan surat edaran. Fungsi ini mencakup penyusunan, pengiriman, dan pendokumentasian surat-surat resmi yang mengomunikasikan kebijakan baru, perubahan peraturan, pelaksanaan program, dan kegiatan lainnya kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSP, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri. Proses penyusunan surat edaran dimulai dari identifikasi kebutuhan dan tujuan, penyusunan draft oleh tim, reviu untuk memastikan akurasi, hingga persetujuan dan distribusi melalui saluran fisik maupun digital.

4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelayanan optimal bagi pemangku kepentingan, instansi terkait, dan masyarakat, Sekretariat BNSP secara terus menerus memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas di lingkungan BNSP. Fasilitas-fasilitas ini mencakup gedung kantor, ruang rapat, ruang laktasi, ruang perpustakaan, musala, tempat parkir, area resepsionis, serta bilik layanan informasi dan konsultasi.

Selain itu, BNSP juga telah mengembangkan *desk* layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk masyarakat dan pengunjung yang membutuhkan informasi publik. Sebagai tambahan, telah dibangun *autogate* untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses bagi pegawai dan tamu yang berkunjung ke gedung BNSP. Fasilitas ini ditujukan meningkatkan kenyamanan dan produktivitas seluruh pengguna layanan BNSP.

5. Penghargaan BNSP

BNSP meraih prestasi membanggakan dengan mendapatkan Penghargaan Menuju Informatif dalam kategori Lembaga Non Struktural. Penghargaan ini diumumkan dalam acara "Catatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023" yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, pada Rabu, 20 Desember 2023.

Penghargaan tersebut diberikan oleh KIP sebagai pengakuan atas dedikasi BNSP dalam mendorong transparansi dan keterbukaan informasi. Dalam upayanya memastikan akses informasi yang maksimal, BNSP akan terus didampingi oleh KIP melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di tahun-tahun mendatang. Penghargaan ini tidak hanya sebagai prestasi, tetapi juga sebagai tolak ukur kualitas informasi yang disajikan BNSP kepada publik. Wakil Ketua Komisioner BNSP, Ulfah Mashfufah, dengan bangga menerima piagam penghargaan tersebut. Ia menegaskan tanggung jawab BNSP dalam mewujudkan masyarakat yang terinformasi dan menjadikan keterbukaan sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.



PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023



Gambar 55. BNSP Meraih Penghargaan Menuju Informatif pada Kategori Catatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden Republik Indonesia, seluruh pemangku kepentingan, dan publik. Melalui laporan ini, kami menyampaikan berbagai pencapaian, tantangan, serta upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi BNSP sepanjang tahun 2023.

Kami percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, laporan ini tidak hanya mencerminkan komitmen kami dalam melaksanakan peran dan amanah yang diberikan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan refleksi untuk perbaikan pada masa mendatang.

Terlebih dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang dan mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan bersaing secara global, BNSP juga telah menetapkan tujuh capaian prioritas untuk periode 2023—2028. Ketujuh capaian ini akan menjadi landasan dan arah strategis bagi BNSP dalam lima tahun ke depan karena BNSP telah memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas dan efektivitasnya sebagai gerbang kompetensi Indonesia. Berikut ini adalah uraian rinci mengenai ketujuh capaian tersebut:

1. Penguatan Tugas dan Fungsi BNSP

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi, BNSP fokus pada penguatan tugas dan fungsi utamanya. Langkah ini mencakup perbaikan proses internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penyempurnaan regulasi serta kebijakan yang mendukung tugas BNSP.

2. Program Kerja BNSP 2023—2028

BNSP telah merancang program kerja yang komprehensif untuk lima tahun ke depan. Program ini mencakup berbagai inisiatif strategis yang dirancang untuk mencapai target-target spesifik, seperti peningkatan jumlah sertifikasi kompetensi, pembaruan standar kompetensi, dan perluasan jangkauan sertifikasi ke berbagai sektor industri.

3. Sistem Manajemen Mutu BNSP

Untuk memastikan bahwa setiap proses dan layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang tinggi, BNSP menerapkan sistem manajemen mutu yang ketat. Sistem ini mencakup evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap prosedur kerja, mekanisme sertifikasi, serta pengawasan dan pengendalian mutu.

4. Rencana Strategis BNSP 2023—2028

Rencana strategis ini merupakan peta jalan yang jelas bagi BNSP dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Rencana ini mencakup visi, misi, serta sasaran strategis yang hendak dicapai, termasuk peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja.

5. Kerja Sama Lintas K/L-Dudika-Organisasi Nasional dan Internasional

BNSP berkomitmen untuk memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L), dunia usaha dan dunia industri (Dudika), serta organisasi nasional dan internasional. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa standar kompetensi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan global, serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta sertifikasi kompetensi dunia.

6. Roadmap Sertifikasi Kompetensi Indonesia Emas 2045

Sebagai bagian dari visi jangka panjang, BNSP mengembangkan roadmap sertifikasi kompetensi hingga tahun 2045. Roadmap ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan siap bersaing di kancah global, sejalan dengan target Indonesia Emas 2045.

7. Pusat Literasi Kompetensi Indonesia

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi, BNSP mendirikan Pusat Literasi Kompetensi Indonesia. Pusat ini akan menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat, tenaga kerja, dan industri mengenai manfaat dan prosedur sertifikasi kompetensi.

7 Capaian BNSP untuk 2023—2028

